



RENJA 2026



**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec Ilir Timur I Kota Palembang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Kapten A.Rivai / Ade Irma Nasution No.10
Telepon 351854 Palembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/24/DPKP.I/2026

TENTANG :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENCANA KERJA) TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sumatera Selatan;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;

23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENJA) 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :
- Koordinator : Ir. H. Yudho Joko Prasetyo., ST.,MM
IPM.,ASEAN.Eng
- Sekretaris : Erisa Susanti ST., M.Si
- Ketua Bidang Sekretariat : Ir. H. Yudho Joko Prasetyo., ST.,MM
IPM.,ASEAN.Eng
- Ketua Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan : Edy Garibaldi, ST
- Ketua Bidang Perumahan : H. Zulkarnaen, SP.,MM
- Ketua Bidang AMPL : M. Saiful Islam, ST.,MT
- Ketua Bidang Bangkim : H. Ahmad Wahidin, S.ST,ST.,MT
- Anggota : Yudo Harriyanto, SE
Alvita Cindy Wijaya, S.Tr.I.P
Agustini
- KEDUA : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Aswardani, ST.,M.M.,IPM.,ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10 Telp. 374347 Fax 35 1972
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800 / 24 /DPKP.I/2026

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Perangkat Daerah (PD). Menyiapkan rancangan Renja – PD sesuai dengan tugas pokok dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa Dalam penyusunan Renja – PD Provinsi Sumatera Selatan 2026 setiap PD di susun untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja yang disebut Renja – PD dan ditetapkan dengan keputusan kepala PD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);

3. Undang – Undang Nomor 04 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
8. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 halaman 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Pedoman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan, Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026

merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun ;

- Kedua : Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program, dan rencana tahunan. Uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan yang disebut Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 Januari 2026

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**



Ir. H . Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari Rencana Strategis dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang semula bernama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan.

Guna mendukung visi Provinsi Sumatera Selatan "Sumsel Maju Terus Untuk Semua". Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana kerja dengan menetapkan program dan kegiatan tahunan dan dalam rangka mewujudkan visi dan agenda tersebut.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembangunan prasarana dan sarana dasar menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman penyusunan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta acuan bagi penyusunan program tahunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan dan lima tahunan yang mengacu pada Renstra dan RPIJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI	
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan	
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Capaian	
Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Selatan.....	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan	
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	28
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN	
RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PROVINSI SUMATERA SELATAN	30
3.1 Daftar kegiatan yg dihilangkan.....	30
3.2 Daftar Kegiatan yang berkurang atau bertambah	30
3.3 Daftar Kegiatan Baru	30
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN.....	33
DAFTAR TABEL	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja adalah bagian dan turunan dari Rencana Strategis. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 2025-2045 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah disebut (Renstra PD) dan untuk rencana tahunan PD disebut Rencana Kerja PD (Renja PD).

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang semula bernama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan yang berfungsi sebagai unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Guna mendukung Visi Provinsi Sumatera Selatan **"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"** dan Misi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Membangun sumsel berbasis ekonomi kerakyatan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Kewajiban PD untuk menyusun Renja sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);
3. Undang – Undang Nomor 04 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
8. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 halaman 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Pedoman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan, Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja PD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah umumnya yang juga merupakan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis.

Penyusunan Renja PD bertujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tupoksi serta untuk mengakomodir usulan program/kegiatan multistakeholder PD guna masukan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) tahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan Renja PD adalah tersusunnya dokumen perencanaan tahunan PD yaitu tahun 2026 yang selaras dengan tupoksi dan Renstra dan RPJMD 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja, penjelasan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu
Berisikan kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2025) dan perkiraan capaian tahun 2026, capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD

Berisikan Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan melaksanakan kewenangan desentralisasi, dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh gubernur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225 Tahun 2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), maka pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian disempurnakan lagi dengan perubahan nama dinas yang semula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No: 66 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No: 66 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang telah diperbarui dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2018 dan Hal pembentukan, Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan penyehatan Lingkungan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, membawahi ;
 - a. Seksi Perencanaan dan pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - b. Seksi Penataan Bangunan
 - c. Seksi Penataan lingkungan Kawasan
6. Bidang Perumahan, membawahi.
 - a. Seksi Penyiapan Data Perumahan
 - b. Seksi Penyuluhan Perumahan
 - c. Seksi Penyediaan Perumahan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (UPTD PIP2B),
 - a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD PIP2B
 - b. Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bsnungan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tupoksi dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hasilnya dapat langsung dirasakan / diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang secara langsung memberikan layanan informasi mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada tahun Anggaran 2025 melalui APBD-P Provinsi Sumatera Selatan telah dianggarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan strategis selain kegiatan rutin yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.9 Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2.1 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
3. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

2.2 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
2. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
3. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
4. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
5. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
6. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

4.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
3. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

7.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

8. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

8.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

9.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi
2. Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
4. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

10. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

10.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1. Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
2. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
3. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
4. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

11.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

12. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

12.1 Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1. Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
2. Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
3. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
5. Penyediaan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
6. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
7. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
8. Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

12.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

1. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI

12.3 Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
2. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi

Program/kegiatan tahun 2025 tetap diarahkan dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2025 kegiatan juga akan diarahkan mendukung tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu, peningkatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis. Oleh karena itu, kegiatan strategis tersebut secara langsung mendukung program-program strategis Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.

Sesuai dengan tema Pembangunan 2025 Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan Yang Unggul Dan Terdepan Selain itu Program/kegiatan tahun 2025 juga mengakomodir Program kementerian PUPR yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan usulan program perencanaan yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun Anggaran 2026 melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan telah dianggarkan kegiatan strategis yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

9. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
11. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.8 Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2.1 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

2.2 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
3. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
5. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
7. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

4.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
3. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

3. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

7.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik Regional

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

8.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
2. Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi

9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

9.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1. Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
2. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
4. Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

10. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

10.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

11.1 Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
3. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
4. Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

11.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

1. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI

11.3 Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagian merupakan program strategis Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Pusat Olahraga Nasional. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2025 akan menjadi bagian dari perencanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Target indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ditentukan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan yang dituangkan dalam program / kegiatan yang mendukung indikator kerjanya.

Indikator kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan terdiri dari :

- Akses Air Minum Layak
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan
- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
- Nilai Sakip Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi		Proyeksi	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027
1	Akses Air Minum Layak	%	89,35%	90,35%	92,76%	95,18%	97,59%	100%	-	86,82%	90,35%	92,76%
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54%	82,43%	84,32%	86,22%	88,11%	90%	-	85,5%	82,43%	84,32%
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	65,01%	68,6%	69,6%	70,6%	71,6%	72,6%	-	65,74%	68,6%	69,6%
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	34,00%	38,00%	40,5%	43,00%	43,10%	43,20%	-	60,93%	38,00%	40,5%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang keciptakaryaan dan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang keciptakaryaan, perumahan dan penataan ruang. Pelaksanaan program/kegiatan bidang keciptakaryaan memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk pencapaian target kinerja dengan dukungan pendanaan dari semua sektor. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai atasan langsung dari Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Penyusunan program juga sudah lebih terpadu dengan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program yang telah ada masih juga terdapat kendala antara lain :

- program/kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten/kota belum memiliki Detail Engineering Design (DED)
- kondisi lahan belum siap. Hal ini akan menghambat penganggaran karena dana daerah untuk urusan bersama sebagai sharing Provinsi ataupun kabupaten/kota harus bergeser tahunnya.

Hal ini juga berdampak pada pencapaian target program 5 tahunan yang direncanakan serta target-target yang berhubungan dengan pencapaian target program Nasional juga tidak tepat waktu.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan koordinasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan program/kegiatan ke depan, agar lebih terpadu. Selain itu, program strategis tahunan yang menjadi agenda nasional dan provinsi Sumatera Selatan juga menjadi perhatian untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan SKPD.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta penetapan strategi yang menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan, peraturan dan perundangan
- b. Peningkatan prasarana dan sarana operasional perkantoran
- c. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum perkotaan
- d. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum perdesaan
- e. Pengurangan titik genangan air di kawasan permukiman
- f. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat
- g. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
- h. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan
- i. Pemantapan peran dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman
- j. Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial

- k. Pemantapan peran dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi
- l. Pemantapan peran dan fungsi bidang penataan ruang
- m. Penyediaan data dan informasi keciptakaryaan yang berkualitas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga termasuk di Prioritas Nasional “ **Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau** ” dan “ **Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman** ” turun ke Prioritas Daerah Peningkatan Pelayanan Dasar, dan ada pula Program Prioritas terbagi juga Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang turun di kegiatan Prioritas yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ke dalam Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Air Minum dan Sanitasi layak Bagi Masyarakat Miskin. Selain Program Prioritas diatas ada pula Program Prioritas yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Program Prioritas tersebut pula dibagi menjadi tiga bagian Kegiatan Prioritas antara lain, Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau, Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman, Peningkatan kualitas Lingkungan di Permukiman itu yang termasuk di dalam. Program dan Kegiatan tersebut mejadi Program Prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rencana program dan kegiatan dalam renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 antara lain :

I Daftar kegiatan yg dihilangkan

-

II Daftar Kegiatan yang berkurang atau bertambah

-

III Daftar Kegiatan Baru

-

BAB IV PENUTUP

Terwujudnya Pembangunan yang berkesinambungan tidak terlepas dari komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai elemen penunjang pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya

penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pencapaian visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ***"Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdepan dalam terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berbudaya, aman, nyaman, dan berkelanjutan"*** guna mendukung Visi Provinsi Sumatera Selatan ***"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua,"*** hal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparaturnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan melaksanakan kewenangan desentralisasi, dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, perumahan, tat bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan yang di tetapkan oleh gubernur.

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk pencapaian target kinerja dengan dukungan pendanaan dari semua sektor dan program kegiatan menjadi terpadu dan saling memperkuat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program strategis membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan perlu menjadi perhatian sehingga kesemua program dapat terlaksana sehingga indikator kinerja tahunan dapat tercapai.

Program/kegiatan yang telah menjadi kesepakatan hasil Rapat Teknis PD, masih memerlukan justifikasi ulang terhadap kesiapan lahan dan DED yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota. Oleh karena itu, akan dilihat lebih detail mengenai kesiapan masing-masing usulan kegiatan sesuai prioritas kebutuhan.

Palembang, 23 Januari 2026

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan,**



Ir. H . Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197511251999031004

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Renja 2025



**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

URUSAN : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5		6	7
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100	Persen	<u>29.690.017.579</u>	
	1	04	01	1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	100	Persen	<u>945.646.847</u>	
	1	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	2	Dokumen	102.676.544	
	1	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	14.500.050	
	1	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	12.000.021	
	1	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	14.452.683	
	1	04	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	12.000.021	
	1	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah	1	Laporan	41.339.818	
	1	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	1	Laporan	194.466.638	
	1	04	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	Prov. Sumsel	1	Data	82.753.923	
	1	04	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	1	Berita Acara	227.283.099	
	1	04	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Prov. Sumsel	1	Dokumen	46.385.116	
	1	04	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Dalam dan Luar Daerah	1	Berita Acara	197.788.934	
	1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun	Prov. Sumsel	100	Persen	<u>24.638.611.052</u>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5		6	7
	1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sumsel	249	Orang	23.877.187.080	
	1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Sumsel	1	Dokumen	651.320.000	
	1	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	16.000.000	
	1	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	32.053.972	
	1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Sumsel	1	Laporan	51.850.000	
	1	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prov. Sumsel	1	Dokumen	6.200.000	
	1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Prov. Sumsel	1	Laporan	4.000.000	
	1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun	Prov. Sumsel	100	Persen	24.562.500	
	1	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Sumsel	1	Dokumen	8.000.000	
	1	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Sumsel	1	Laporan	16.562.500	
	1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	Prov. Sumsel	100	Persen	204.549.150	
	1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Sumsel	1	Dokumen	23.039.150	
	1	04	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Sumsel	1	Dokumen	15.175.000	
	1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	10	Orang	150.500.000	
	1	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dalam dan Luar Daerah	30	Orang	15.835.000	
	1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Prov. Sumsel	100	Persen	1.506.749.601	
	1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	1	paket	30.000.000	
	1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov. Sumsel	1	paket	6.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5	6	7
	1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 paket	157.152.462	
	1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 paket	46.257.139	
	1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Dokumen	31.400.000	
	1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Sumsel	1 Laporan	32.000.000	
	1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	804.190.000	
	1	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Sumsel	1 Dokumen	6.000.000	
	1	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Sumsel	1 Dokumen	393.750.000	
	1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Prov. Sumsel	100 Persen	1.326.764.829	
	1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Sumsel	1 Laporan	18.000.000	
	1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Laporan	706.164.829	
	1	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Laporan	60.000.000	
	1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Laporan	542.600.000	
	1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Prov. Sumsel	100 Persen	993.133.600	
	1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Sumsel	22 unit roda empat 6 unit roda dua	717.933.600	
	1	04	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Prov. Sumsel	1 Unit	25.000.000	
	1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Sumsel	1 Unit	250.200.000	
						Penyusunan DED Rehabilitasi Gedung Kantor	- Jumlah Dokumen yang Tersusun	Prov. Sumsel	1 Dokumen	150.100.000	
						Penyusunan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Gedung Kantor	- Jumlah Dokumen yang Tersusun	Prov. Sumsel	1 Dokumen	100.100.000	
	1	04	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan	Prov. Sumsel	100 Persen	50.000.000	

[illegible]

NO	PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2					3	4	5	6	7
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Prov. Sumsel	13,4%	5.251.928.660	
	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen /Laporan Penataan Kawasan Kumuh dengan luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha	Prov. Sumsel	1 Dokumen	555.601.003
	1	04	03	1.01	0008	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Prov. Sumsel	1 Dokumen	60.300.000
						Penyusunan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Selatan	- Jumlah Dokumen yang Tersusun	Prov. Sumsel	1 Dokumen	60.300.000
	1	04	03	1.01	00011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Prov. Sumsel	1 Sistem Informasi	89.179.119
						Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis GIS	- Jumlah Sistem Layanan Informasi yang Dikembangkan	Prov. Sumsel	1 Sistem Informasi	89.179.119
	1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Prov. Sumsel	7 Kelompok Masyarakat	143.569.395
	1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	262.552.489
	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan	Prov. Sumsel	8 Kws	4.696.327.657
	1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	111.810.881
	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Prov. Sumsel	7 Unit Rumah	200.000.000
	1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	165.152.913
	1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov. Sumsel	3 Unit Rumah	200.000.000
	1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov. Sumsel	1 Dokumen	14.699.982
	1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Prov. Sumsel	1792,28 Hektar	3.499.663.881

NO	PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2					3	4	5		6	7
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dusun 1, - 2, dan 3 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang	EMPAT LAWANG	1	Kws	515.000.000	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Desa - Sugihan Kec. Rambang Kab. Muara Enim	MUARA ENIM	1	Kws	500.000.000	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh di - Sepancar Lawang Kulon 2 Kel. Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu	OKU	1	Kws	500.000.000	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Kel. - Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan	OKU SELATAN	1	Kws	994.663.881	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh di RT 06, - 07, 10 dan 15 Desa Lubuk Lancang Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin	BANYUASIN	1	Kws	500.000.000	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh di RT 20, - 22, 23, 24, dan 25 Born Berlian Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin	BANYUASIN	1	Kws	490.000.000	
	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kab/Kota	1792,28	Ha	505.000.000	
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di - Sekarjaya 3 Kel. Sekarjaya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu	OKU	1	Kws	505.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	17 Kab/Kota	50,62	%	<u>17.175.304.024</u>	
	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	17 Kab/Kota	10	Lokasi	<u>17.175.304.024</u>	
	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Prov. Sumsel	10	Dokumen	1.552.000.000	
	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	dalam dan luar daerah	1	Laporan	226.520.000	
	1	04	05	1.01	0009	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kab/Kota	10	Lokasi	15.396.784.024	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5		6	7
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. Banyuasin	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	BANYUASIN	1 Lokasi	2.700.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. Ogan Komering Ilir	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	OKI	1 Lokasi	1.320.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. Lahat	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	LAHAT	1 Lokasi	300.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. Empat Lawang	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	EMPAT LAWANG	1 Lokasi	500.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kota Palembang	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	PALEMBANG	1 Lokasi	7.116.784.024	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. Ogan Komering Ulu	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	OKU	1 Lokasi	326.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. Muara Enim	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	MUARA ENIM	1 Lokasi	880.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kota Lubuk Linggau	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	LUBUK LINGGAU	1 Lokasi	700.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. OKU Selatan	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	OKUS	1 Lokasi	674.000.000	
							- Penyediaan PSU Permukiman Kab. OKU Timur	- Panjang Jalan Lingkungan dan drainase yang dibangun	OKUT	1 Lokasi	880.000.000	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Prov. Sumsel	26,86	Persen	<u>116.000.000</u>	
	1	04	06	1.01			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	<u>116.000.000</u>	
	1	04	06	1.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	116.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
							Persentase Akses Air Minum Layak	Prov. Sumsel	90,35	Persen		

NO	PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2					3	4	5		6	7
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	1,7	Persen	818.536.934	
	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	2	Dokumen	818.536.934	
	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Prov. Sumsel	17	Kab/Kota	151.826.059	
						- Pembinaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan		17	Kab/Kota	116.559.072	
						Sinkronisasi dan Koordinasi Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota		1	Dokumen	35.266.987	
	1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	Prov. Sumsel	1	Dokumen	597.851.803	
						- Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Selatan		1	Dokumen	597.851.803	
	1	03	03	1.01	0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Prov. Sumsel	18	Lembaga	68.859.072	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Prov. Sumsel	82,43	Persen	994.098.865	
						Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		11,4	Persen		
	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Prov. Sumsel	2	Dokumen	994.098.865	
	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dalam dan Luar Daerah	3	Dokumen	769.653.918	
						- Feasibility Study Sistem Air Limbah Domestik Regional Provinsi Sumatera Selatan		1	Dokumen	680.339.782	
						- Legalisasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Sumatera Selatan		1	Dokumen	44.657.068	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5		6	7
						- Legalisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan	- Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur yang disusun		1	Dokumen	44.657.068	
	1	03	05	1.01	0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Prov. Sumsel	17	Kab/Kota	224.444.947	
						- Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina	Prov. Sumsel	17	Kab/Kota	170.971.447	
						- Program PPMU PCSP (Provincial Project Management Unit Palembang City Sewerage Project)	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina	Prov. Sumsel	1	Kab/Kota	18.320.435	
						- Sinkronisasi dan Koordinasi Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina	Prov. Sumsel	17	Kab/Kota	35.153.065	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Prov. Sumsel	79,27	Persen	<u>2.584.661.707</u>	
	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	79,27	Persen	<u>2.584.661.707</u>	
	1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Prov. Sumsel	100	SR	1.039.864.881	
						- Perluasan SPAM JP Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI	- Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	OKI	100	SR	1.039.864.881	
	1	03	07	1.01	0039	Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Kab/Kota	50	Rumah Tangga	1.544.796.826	
						- Pembangunan SPALDS Kec. Tugumulyo di Kab. Musi Rawas	- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	MURA	25	Rumah Tangga	772.421.996	
						- Pembangunan SPALD individual Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat lawang	- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	EMPAT LAWANG	25	Rumah Tangga	772.374.830	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Prov. Sumsel	52,86	Persen	<u>3.083.492.567</u>	
	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara	Prov. Sumsel	1	Gedung	<u>3.083.492.567</u>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5		6	7
	1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Prov. Sumsel	1	Bangunan Gedung Cagar Budaya	244.641.985	
	1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Prov. Sumsel	5	Lisensi	192.165.791	
	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Prov. Sumsel	17	Kab/Kota	211.615.791	
	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	1	Dokumen	2.435.069.000	
						- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pasar Cinde Palembang	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	PALEMBANG	1	Dokumen	1.095.130.000	
						- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Masjid Provinsi Sumatera Selatan	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	PALEMBANG	1	Dokumen	1.339.939.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dalam dan Luar Daerah	32	Persen	<u>559.954.530</u>	
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	Dalam dan Luar Daerah	1	Kawasan	<u>559.954.530</u>	
	1	03	09	1.01	0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Prov. Sumsel	1	Dokumen	250.999.920	
	1	03	09	1.01	0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Prov. Sumsel	17	Kab/Kota	308.954.610	
						- Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi yang tersusun	Prov. Sumsel	1	Dokumen	308.954.610	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Prov. Sumsel	73	Persen	<u>1.429.318.445</u>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN TA 2026 (R-APBD)	KETERANGAN
1	2						3	4	5		6	7
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM Tenaga Ahli Konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	Prov. Sumsel	150	Orang	<u>782.966.347</u>	
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Prov. Sumsel	125	Orang	362.334.896	
	1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Dalam dan Luar Daerah	2	Lembaga	142.530.607	
	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Prov. Sumsel	70	Orang	214.683.276	
	1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Prov. Sumsel	1	Lembaga	63.417.568	
	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase data cakupan Provinsi yang diupdate melalui sistem informasi jasa konstruksi	Prov. Sumsel	70	Persen	<u>499.418.554</u>	
	1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Prov. Sumsel	1	Layanan Informasi	65.107.767	
	1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Prov. Sumsel	1	Perangkat Pendukung	248.249.608	
	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Prov. Sumsel	1	Dokumen	127.681.910	
	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prov. Sumsel	8	Orang	58.379.269	
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase kebijakan Jasa Konstruksi yang di implementasikan	Prov. Sumsel	75	%	<u>146.933.544</u>	
	1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Prov. Sumsel	1	Badan Usaha	146.933.544	
BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL											63.008.053.311	
TOTAL BELANJA											63.008.053.311	